"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK"

Oleh :

Lusiana Jayanti Sara
21109171

Dibawah Bimbingan Inta Budi Setyanusa.SE.,M.Ak

ABSTRACT

Phenomenon that occurs is tax knowledge of taxpayers abaout the tax is low, people's understanding of the modern tax administration system is still low, still lessthe taxpayers right to know and understand about the e-system and how to use them, are common problems affect in online system tax compliance in meeting their tax obligations . The purpose of this study is to determine the effect of tax knowledge and modern administration system to the individual taxpayers compliance at KPP Pratama Bandung Karees.

The method used in this research is descriptive method and verifikatif. The unit of analysis in this study is an individual taxpayer at KPP Pratama Bandung Karees the number of those 60 people. Using validity and reliability testing as a measure of research. Statistical tests were done is to design a structural model, the measurement model of the designing, construct the path diagram, line diagram conversion into the equation, estimation, Goodness of Fit and hypothesis testing using software SmartPLS 2.0.

The result of this study indicate that the tax knowledge and modern tax administration system significantly positive effect on tax compliance at the individual KPP Pratama Bandung Karees.

Keywords : tax knowledge, modern tax administration system, tax compliance

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia ini dapat dilakukan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang (I Nyoman; 2009). Kedua fungsi ini bias berjalan jika didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai (I Nyoman; 2009). Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak (I Nyoman; 2009).

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang (Siti Kurnia rahayu; 2010). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia Rahayu; 2010). Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Siti kurnia Rahayu; 2010).

Terbukti menurut Agus Martowardojo menyatakan tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah. Seperti wajib pajak perorangan masih sebanyak 8,5 juta dari 110 juta yang aktif bekerja dengan rasio SPT hanya 7,7 persen. Dibandingkan dengan Negara lain seperti Jepang mencapai 50%. Sementara itu, bdan usaha yang berdomisili dengan tempat usaha tetap dan aktif sebanyak 12 juta maka hanya 3,6% kepatuhan (Agus Martowardojo; 2009).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto; 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak (Gardina dan Haryanto; 2006). Lebih lanjut Gardina dan Haryanto (2006) mengatakan bahwa frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan.Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan (Gardina dan Haryanto; 2006).Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan(Gardina dan Haryanto; 2006).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu; 2010). Kepatuhan wajib pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya, konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (John Hutagaol, 2007). Lebih lanjut menurut John Hutagaol (2007),

pelaksanaan *self assessment system* menuntut keikut sertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak diperlukan dengan tujuan untuk penerimaan pajak optimal.

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak (Sri Rahayu dan Lingga, 2009).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secra langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Melalui moderenisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Kelemahan administrasi perpajakan modern disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi admnistrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur (Hendroharto, 2006).

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah terbukti dalam berbagai penelitian (Mohamad ali et al; 2007). Pengetahuan pajak seperti pengetahuan pajak umum atau formal seperti pendidikan yang diterima atau pengetahuan. Secara khusus untuk penghindaran pajak (Esiksen dan Fallan; 2002), selain itu penelitian lain mengatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan pembayar pajak untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan dan kemampuan untuk memahami perpajakan (Singh; 2003). Salah satu penyebab pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak atau sosialisasi yang dilakukan direktur jendral Pajak (Supriyati & Nur Hidayati; 2008).

Usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak selain dengan memberikan sosialisasi, juga dengan menerapkan modernisasi administrasi perpajakan dengan sistem informasi yang modern (Yunus Darmono,2008). Lebih jelasnya, untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas aparatur perpajakan, pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan yang disebut dengan modernisasi. Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada wajib pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif (Siti Kurnia Rahayu,2010:109).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di ajukan di dalam masalah ini adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman tentang pengetahuan pajak oleh wajib pajak.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami dan mengetahui benar *e-system* dan cara penggunaannya.
3. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagian wajib pajak tentang pajak..

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian pada KPP Bandung Pratama Karees sebagai berikut :

Maksud Penelitian

Adapun maksud dalam penelitian ini yaitu untuk mencari kebenaran bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi pajak modern administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

KERANGKA PENELITIAN

Keterkaitan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keterkaitan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) adalah sebagai berikut:

“Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan”.

Fallan (1999) menyatakan seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:141):

"Kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akkan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan disuatu negara yang adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalammembayar pajak".

Supriyati & Nurhidayati (2008; Vol.7 No 1) menyatakan bahwa:

"Bahwa pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang diperoleh langsung dari petugas pajak atau pun sosialisai, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Keterkaitan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010; Vol.2 No.2):

"Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi modern yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak."

Menurut Abdul Rahman (2009) berdarkan hasil penelitiannya hubungan antara sistem admnistrasi perpajakn modern adalah sebagai berikut:

"*Modern tax administration system significantly correlates to taxpayer's compliance*".

"Sistem administrasi perpajakan modern bekorelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".

Berdasarkan hasil penelitian Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga (2009; Vol.1 No.2) :

"Bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak adalah system administrasi yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi bekorelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2010:2) metode penelitian menyatakan bahwa:

"Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiono (2010:29), pengertian metode analisis deskriptif menyatakan bahwa:

"Statistika yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya".

Sedangkan verifikatif menurut Sugiono (2010:6) menyatakan bahwa:

"Penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima".

Desain Penelitian

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	**Desain Penelitian**			
	Jenis Penelitian	**Metode yang digunakan**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T-1	***Deskriptif* dan *verifikatif***	***Explanatory survey***	**Wajib Pajak Orang Pribadi**	***Cross Sectional***
T-2	***Deskriptif* dan *verifikatif***	***Explanatory survey***	**Wajib Pajak Orang Pribadi**	***Cross Sectional***
T-3	***Deskriptif* dan *verifikatif***	***Explanatory survey***	**Wajib Pajak Orang Pribadi**	***Cross Sectional***

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	**Konsep**	**Indikator**	**Skala**	**Nomer Kuesioner**
Pengetahuan	Pemahaman prosedur atau	1. Pemahaman	Ordinal	1 - 2

Pajak (X1)	cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang. (Taslim; 2007)	prosedur atau cara pengisian SPT 2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT 3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi Verani Supriyati; 2012)		3 4 - 5
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2)	Modernisasi system perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *GOOD Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *GOOD governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan system teknologi yg handal dan terkini. (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 109)	*1. e-Registration* *2. e-SPT* *3. e-Filing* (Siti Kurnia Rahayu; 2010)	Ordinal	1 – 2 3 4 - 5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Norman D. Nowak (Siti Kurnia, 2010:138)	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembaayaran utang pajak 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha (2004:9)	Ordinal	1 – 2 3 4 5

Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti mengenai “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” adalah sumber data primer.

Sumber primer menurut Sugiyono (2009:137) menjelaskan bahwa :

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” .

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu melalui cara menyebar kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tehnik Penentuan Data

Teknik penentuan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sample. Pengertian dari populasi dan sampel itu sendiri adalah sebagai berikut :

Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2010 : 80), yaitu :

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Maka dari itu populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 60 orang yang dijadikan sebagai responden untuk dijadikan sampel dengan melanjutkan kepada hasil penelitian yang akan di uji.

Sampel

Sedangkan pengertian sampel menurut Sugiyono (2010 : 81), yaitu :

> "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik probabilitas sampling.

Menurut Sugiyono (2010 : 82) pengertian Probabilitas Sampling yaitu :

> "Probabilitas Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel." Adapun cara pengambilan sampel ini disajikan dengan cara simple random sampling".

Menurut Sugiyono (2010:82) simple random sampling adalah :

> "Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu".

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah probabilitas sampling dimana sampel di dasarkan atas populasi pada satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Karena alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah structural equation modeling (SEM), maka ukuran sampel dihitung berdasarkan ketentuan yang ada dalam penggunaan structural equation modeling. Bentler and Chou (1987) dalam Schumacker and Lomax (2004:50) menyarankan jumlah sampel paling sedikit 5 kali jumlah parameter. Pada penetian ini terdapat sebanyak 10 parameter, yang terdiri dari 8 loading factor dan 2 koefisien jalur. Sesuai dengan pendapat Bentler and Chou tersebut maka jumlah sampel minimal pada penelitian ini adalah :

n = jumlah parameter $\times 5$

$= 10 \times 5$

$= 50$

Jadi jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara sebagai beriku. Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan KPP yang berhubungan dengan variable penelitian.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai teori dan asumsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berupa buku-buku, dokumentasi perusahaan dan referensi lain berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jenis skala pengukuran yang digunakan yaitu ordinal, dimana Zainal Mustafa (2009:55) menyatakan bahwa :

> " Skala ordinal merupakan suatu instrument yang menghasilkan nilai atau skor yang bertingkat atau berjenjang (bergradasi)."

Dalam operasionalisasi variable ini semua variable diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Menurut Sugiyono (2011:93) menyatakan bahwa :

> " Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial."

Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif). Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Scoring Untuk Jawaban Kuesioner Positif

Jawaban Responden	Skor
A	5
B	4
C	3
D	2
E	1

Sumber: Sugiyono (2010:94)

Untuk pertanyaan negatif, tingkat jawabannya terdapat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Scoring Untuk Jawaban Kuesioner Negatif

Jawaban Responden	Skor
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5

Sumber: Sugiyono (2010:94)

Menurut *Cooper* (2006) Umi Narimawati (2011:42) validitas adalah :

"Validity is a characteristic of measurement concerned with the extend that a test measures what the researcher actually wishes to measure".

Adapun rumus daripada korelasi *pearson* adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right]\left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right]}}$$

(Sumber : Umi Narimawati, 2010, 42)

r = Koefisien korelasi pearson
X= Skor item pertanyaan
Y= Skor Total item pertanyaan
N= Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument

Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji coba dengan t (taraf signifikasi 5%).

$$t = r\frac{\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}} \; ; db = n-2$$

(Sumber : Umi Narimawati, 2010 : 42)

n = ukuran sampel
r = koefisien korelasi pearson

HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 15 butir pernyataan dengan perincian 5 butir pernyataan mengenai pengetahuan pajak, 5 butir pernyataan mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan 5 butir pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *structural equation modeling* sebagai alat bantu dalam penarikan kesimpulan.

Hasil Pengujian Validitas

1) Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan pajak

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan pajak

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 1	0,840	0,30	Valid
Item 2	0,831	0,30	Valid
Item 3	0,743	0,30	Valid
Item 4	0,761	0,30	Valid
Item 5	0,737	0,30	Valid

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel pengetahuan pajak valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2) Hasil Uji Validitas Kuesioner Sistem administrasi perpajakan modern

Tabel 4.2
Hasil uji validitas kuesioner sistem administrasi perpajakan modern

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 6	0,644	0,30	Valid
Item 7	0,546	0,30	Valid
Item 8	0,523	0,30	Valid
Item 9	0,682	0,30	Valid
Item 10	0,507	0,30	Valid

Dari tabel 4.2 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3) Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 11	0,792	0,30	Valid
Item 12	0,756	0,30	Valid
Item 13	0,757	0,30	Valid
Item 14	0,708	0,30	Valid
Item 15	0,764	0,30	Valid

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil Pengujian Reliabilitas

1) Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan pajak

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan pajak
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,842
		N of Items	3[a]
	Part 2	Value	,778
		N of Items	2[b]
	Total N of Items		5
Correlation Between Forms			,901
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,948
	Unequal Length		,950
Guttman Split-Half Coefficient			,916

a. The items are: Item.1, Item.3, Item.5.
b. The items are: Item.5, Item.2, Item.4.

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner pengetahuan pajak sebesar 0,948 (*Spearman-Brown Coefficient*) lebih besar dari nilai kritis 0.70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pajak sudah memberikan hasil yang konsisten.

2) Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sistem administrasi perpajakan modern

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sistem administrasi perpajakan modern
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,657
		N of Items	3[a]
	Part 2	Value	,634
		N of Items	2[b]
	Total N of Items		5
Correlation Between Forms			,703
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,826
	Unequal Length		,831
Guttman Split-Half Coefficient			,808

a. The items are: Item.6, Item.8, Item.10.
b. The items are: Item.10, Item.7, Item.9.

Dari tabel 4.5 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,826 (*Spearman-Brown Coefficient*) lebih besar dari nilai kritis 0.70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel sistem administrasi perpajakan modern sudah memberikan hasil yang konsisten.

3) Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,846
		N of Items	3[a]
	Part 2	Value	,682
		N of Items	2[b]
	Total N of Items		5
Correlation Between Forms			,875
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,933
	Unequal Length		,936
Guttman Split-Half Coefficient			,887

a. The items are: Item.11, Item.13, Item.15.
b. The items are: Item.15, Item.12, Item.14.

Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,933 (*Spearman-Brown Coefficient*) lebih besar dari nilai kritis 0.70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak sudah memberikan hasil yang konsisten.

Analisis Deskriptif Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak para Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pengetahuan pajak diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang pengetahuan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini :

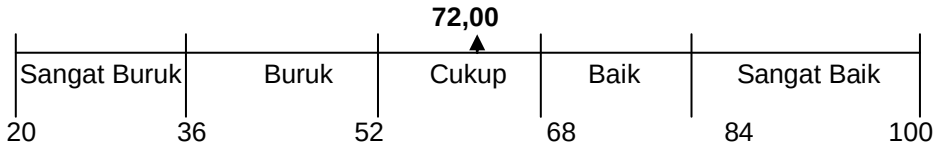
Tabel 4.7
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
Sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menambah pengetahuan/ informasi	246	325	75,69%	Baik
Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Bpk/ Ibu mempermudah dalam	248	325	76,31%	Memudahkan

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
melakukan pengisian SPT				
Tahu batas waktu jatuh tempo penyerahan SPT	202	325	62,15%	Cukup
Sering menerima sanksi akibat terlambat menyetorkan SPT	245	325	75,38%	Jarang
Membayar pajak berarti telah melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik	229	325	70,46%	Baik
Total	**1170**	**1625**	**72,00%**	**Mudah**

(Sumber : Hasil Kuesioner, 2014)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan ke dalam garis kontimum sebagai berikut:



Gambar 4.1
Skala Penafsiran Persentase Skor Total Variabel Pengetahuan pajak

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil persentase total skor jawaban responden pada variabel pengetahuan pajak sebesar 72,0 berada di antara interval 68% – 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak sebagian besar Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah baik. Bila dilihat berdasarkan butir pernyataan, tampak bahwa sosialisasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dirasakan oleh sebagian besar Wajib Pajak dapat menambah pengetahuan/ informasi tentang perpajakan. Karena pengetahuan pajak yang dimiliki oleh ajib Pajak mempermudah dalam melakukan pengisian SPT Hanya saja Wajib Pajak masih banyak yang belum tahu batas waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Namun demikian pada umumnya Wajib Pajak jarang menerima sanksi akibat terlambat menyetorkan SPT karena Wajib Pajak menyadari bahwa membayar pajak berarti telah melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Analisis Deskriptif Sistem Administrasi Perpajakan Modern

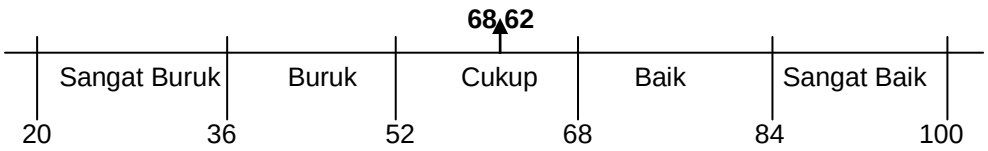
Sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Sistem administrasi perpajakan modern diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden untuk setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil persentase skor jawaban responden seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
e-registration memberikan kemudahaan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	238	325	73,23%	Memudahkan
e-registration mempercepat proses pendaftaran sebagai wajib pajak	232	325	71,38%	Cepat
Pembayaran pajak secara *on-line* memudahkan karena prosesnya cepat	229	325	70,46%	Memudahkan
Mudah melihat situs-situs pajak *e-Filling* (penyampian SPT secara *online&real time*)	210	325	64,62%	Cukup
e-Filling membantu lebih mudah menyampaikan SPT dimanapun berada	206	325	63,38%	Cukup
Total	**1115**	**1625**	**68,62%**	**Baik**

(Sumber : Hasil Kuesioner, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan ke dalam garis kontimum sebagai berikut:



Gambar 4.2
Skala Penafsiran Persentase Skor Total Variabel Sistem
Administrasi Perpajakan Modern

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil persentase total skor jawaban responden pada variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar 68,62 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah baik menurut sebagian besar Wajib Pajak. Bila dilihat berdasarkan butir pernyataan, tampak bahwa *e-registration* memberikan kemudahaan bagi Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. *e-registration* juga mempercepat proses pendaftaran sebagai wajib pajak dan pembayaran pajak secara *on-line* memudahkan bagi Wajib Pajak karena prosesnya cepat. Namun masih banyak Wajib Pajak yang kesulitan melihat situs-situs pajak *e-Filling* (penyampian SPT secara *online&real time*) sehingga *e-Filling* belum banyak membantu guna memudahkan menyampaikan SPT dimanapun Wajib Pajak berada.

Model Pengukuran Variabel Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak tediri dari 3 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel pengetahuan pajak disajikan pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10.
Bobot Faktor Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel Manifest	Bobot factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT	0.900	PP = 0.900 $X_{1.1}$ + 0.190	0.810	38.372
Pemahaman batas waktu pelaporan SPT	0.940	PP = 0.940 $X_{1.2}$ + 0.116	0.884	54.940
Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi	0.864	PP = 0.864 $X_{1.3}$ + 0.254	0.746	28.932
Composite reliability(CR) = 0.925				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.803				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Model Pengukuran Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern terdiri dari 3 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel sistem administrasi perpajakan modern disajikan pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11
Bobot Faktor Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Variabel Manifest	Bobot factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
e-Regristration	0.859	SAPM = 0.859 $X_{2.1}$ + 0.262	0.738	24.475
e-SPT	0.682	SAPM = 0.682 $X_{2.2}$ + 0.535	0.465	5.835
e-Filing	0.876	SAPM = 0.876 $X_{2.3}$ + 0.233	0.767	31.027
Composite reliability(CR) = 0.850				
Average Variance Extracted(AVE) = 0.657				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 2 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel kepatuhan Wajib Pajak disajikan pada Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12
Bobot Faktor Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Manifest	Bobot factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Mendaftarkan Diri	0.952	KWP = 0.952 Y_1 + 0.094	0.906	85.344
Melaporkan SPT tepat waktu	0.953	KWP = 0.953 Y_2 + 0.092	0.906	94.295
Composite reliability(CR) = 0.952				

Variabel Manifest	Bobot factor	Measurement model	R^2	t_{hitung}
Average Variance Extracted(AVE) = 0.908				

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan paradigma penelitian maka hipotesis yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 4.14
Model Struktural Pengaruh Pengetahuan pajak dan Sistem administrasi perpajakan modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Endegenous Constructs	Exogenous Constructs		Error variance
	PP	SAPM	
KWP	$\gamma_{1.1}$PP	$\gamma_{1.2}$SAPM	+ ζ

Keterangan:

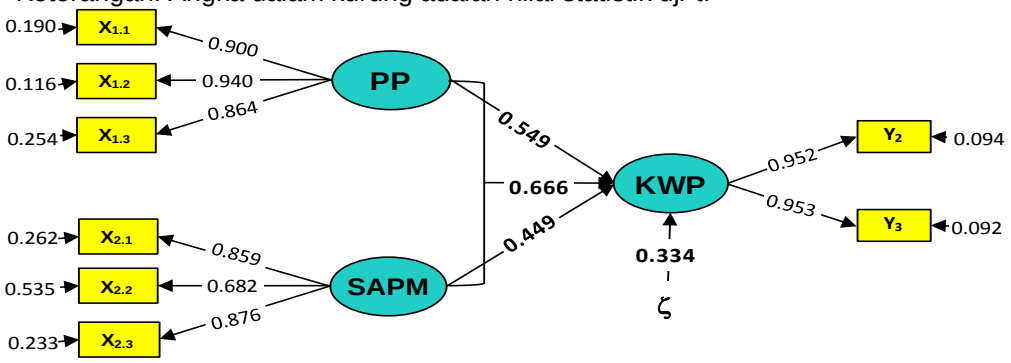
PP : Pengetahuan pajak
SAPM : Sistem administrasi perpajakan modern
KWP : Kepatuhan Wajib Pajak
ζ : Pengaruh faktor lain terhadap kepatuhan Wajib Pajak
$\gamma_{1.1}$: Koefisien pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
$\gamma_{1.2}$: Koefisien pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Dari lampiran hasil pengolahan data menggunakan *software SmartPLS* diperoleh persamaan struktural sebagai berikut.

Tabel 4.15
Persamaan Struktural Pengaruh Pengetahuan pajak, dan Sistem administrasi perpajakan modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Endegenous Constructs	Exogenous Constructs		Error variance
	PP	SAPM	
KWP	0,549 (8,160)	0,449 (5,471)	0,334

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai statistik uji-t.



Gambar 4.5
Diagram Jalur Pengujian Hipotesis

Melalui nilai-nilai koefisien jalur yang terdapat pada gambar 4.2 selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel eksogen (pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan hasilnya sebagai berikut.

❖ Besar pengaruh "Pengetahuan pajak" terhadap kepatuhan Wajib Pajak dihitung sebagai berikut:

- Pengaruh langsung "Pengetahuan pajak" terhadap kepatuhan Wajib Pajak = $(\gamma_{1.1})^2$ = (0,549) × (0,549) = 0,301 **(30,1%)**

- Pengaruh tidak langsung "Pengetahuan pajak" terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena hubungannya dengan sistem administrasi perpajakan modern = $\gamma_{1.1} \times \phi_{1.2} \times \gamma_{1.2}$ = (0,549) × (0,331) × (0,449) = 0,082 **(8,2%)**.

Jadi total pengaruh "pengetahuan pajak" terhadap kepatuhan Wajib Pajak = 30,1% + 8,2% = **38,3%** dengan arah positif, artinya 383% perubahan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat dijelaskan atau disebabkan oleh "pengetahuan pajak".

❖ Besar pengaruh "Sistem administrasi perpajakan modern" terhadap kepatuhan Wajib Pajak dihitung sebagai berikut:

- Pengaruh langsung "sistem administrasi perpajakan modern" terhadap kepatuhan Wajib Pajak = $(\gamma_{1.2})^2$ = (0,449) × (0,449) = 0,201 **(20,1%)**
- Pengaruh tidak langsung "sistem administrasi perpajakan modern" terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena hubungannya dengan pengetahuan pajak = $\gamma_{1.2} \times \phi_{1.2} \times \gamma_{1.1}$ = (0,449) × (0,331) × (0,549) = 0,082 **(8,2%)**.

Jadi total pengaruh "sistem administrasi perpajakan modern" terhadap kepatuhan Wajib Pajak = 20,1% + 8,2% = **28,3%** dengan arah positif, artinya 28,3% perubahan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dapat dijelaskan atau disebabkan oleh "sistem administrasi perpajakan modern".

Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial.

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu peraturan pajak dan pemeriksaan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis:

H_0 : Semua $\gamma_{1.i} = 0$ i = 1 &2	Pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees .
Ha : Ada $\gamma_{1.i} \neq 0$ i = 1 & 2	Pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees .

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F dengan ketentuan tolak Ho jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}, atau sebaliknya terima Ho jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan F_{tabel}. Melalui nilai koefisien determinasi (nilai R^2) dapat dihitung nilai F dengan rumus sebagai berikut.

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{Y(X_1X_2)}}{k(1-R^2_{Y(X_1X_2)})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(65-2-1)\times 0,666}{2\times(1-0,666)}$$

$$= 61,81$$

Dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (2;62) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,145. Karena dari hasil penelitian diperoleh nilai F_{hitung} (61,81) dan lebih besar dibanding F_{tabel} (3,145), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Pengaruh Pengetahuan pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis:

H_0 : $\gamma_{1.1} = 0$	Pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees .
Ha : $\gamma_{1.1} \neq 0$	Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees .

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Pengaruh Pengetahuan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koef. Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Ho	Ha
0,549	8,160	1,96	Ditolak	diterima

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel pengetahuan pajak (8,160) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Secara langsung pengetahuan pajak memberikan pengaruh sebesar 30,1% terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian secara tidak langsung karena hubungannya dengan sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh sebesar 8,2% sehingga total pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 38,3 persen.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan yang baik dari Wajib Pajak tentang pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Pengaruh Sistem administrasi perpajakan modern Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis:

$H_0 : \gamma_{1.2} = 0$ Sistem administrasi perpajakan modern secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

$Ha : \gamma_{1.2} \neq 0$ Sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koef. Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Ho	Ha
0,449	5,741	1,96	ditolak	diterima

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t_{hitung} variabel sistem administrasi perpajakan modern (5,741) lebih besar dari t_{kritis} (1,96). Karena nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{kritis}, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Secara langsung sistem administrasi perpajakan modern memberikan kontribusi sebesar 20,1% terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian secara tidak langsung karena hubungannya dengan pengetahuan pajak memberikan pengaruh sebesar 8,2% sehingga total pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 28,3 persen.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang makin baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak seperti wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan SPT terjadi karena masih banyak wajib pajak masih belum mengetahui bagaimana peraturan perpajakan.
2. Sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak terjadi karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami benar *e-system* dan cara penggunaannya serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem *online* sehingga bertumpuknya data yang akhirnya sistem *online* menjadi terhambat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Saran Operasional

1. Di lihat dari skor aktual yang terendah maka yang harus di berikan fokus perhatian adalah pada indikator batas waktu jatuh tempo penyerahan SPT dalam pengetahuan pajak. Agar wajib pajak mengetahui dan melaksanakan peraturan perpajakan dan untuk kemampuan memahami perpajakan, ketidak pahaman wajib

pajak akan pengetahuan pajak maka diberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perpajakan dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempermudah dalam pengisian SPT. Serta memberikan informasi yang cepat apabila terjadi perubahan pajak dan bats jatuh tempo penyerahan SPT.

2. Nilai skor aktual yang terendah pada indikator sistem administrasi perpajakan modern adalah pada indikator *e-filling*, hal ini harus diberikan fokus perhatian yang utama agar kegiatan *e-filling* berjalan dengan baik. Untuk mengatasi masalah pada sistem administrasi perpajakan modern maka sebaiknya ditingkatkan dengan lebih baik melalui jumlah SDM menambah persentase jumlah pengetahuan mengenai *e-filling*. Selain itu diikuti dengan peningkatan kualitas *e-filling*, kualitas *e-filling* dapat ditingkatkan dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi secara terencana. Kemudian komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak perlu diperbaiki dengan cara sosialisasi yang diadakan oleh KPP kepada wajib pajaksehingga wajib pajak mengetahui tentang sistem adminitrasi perpajakan modern. Dengan diperhatikannya masalah pada sistem administrasi perpajakan modern, maka tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin meningkat.

Saran Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu

Diharapkan agar para pengembang ilmu dapat lebih memberikan bukti empiris bahwa pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Saran Bagi Peneliti Lain

Diharapkan agar peneliti lain melakukan penelitian yang sama dan menggunakan metode yang sama dengan unit analisis dan sampel yang berbeda, supaya hasil dari penelitian tersebut dapat mendukung teori yang sudah ada agar dapat diteliti secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Banu Witono. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.7, No.2, September 2008.

Berry, L. L, Parasuraman, A. and Zeithaml V. (1994). *"Improving Service Quality inAmerica: Lessons Learned, Academy ofManagement Executive.*

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. (2001). *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat. (2004). *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat

Gunadi. ”Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat,” Dalam *Perspektif Baru*, URL: http://www.perspektif.net/articles/ view.asp?id=43 1, 27 September 2003.

Gunadi. 2002. Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan,Salemba Empat, Jakarta.

Ilyas. Wirawan B dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Liberti Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

Marcus Taufan Sofyan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*, Skripsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.

Robert Juran (1998), *Marketing Research &Aplied Orientation,* New Jersey Prentice hall.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA* : Konsep dan Aspek Formal, edisi 1, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rapina, Jerry, Yenni Carolina. (2011). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi Vol.III, No.2 Oktober 2011.

Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.

Siti Resmi. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, buku 1, edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Sophar, Lumbantoruan. 1997. *Ensiklopedi Perpajakan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sri Rahayu., & Ita, Salsalina. L. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung*. *Jurnal Akuntansi.* Vol. 1, No. 2: 119-138.

Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D* (7th ed). Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Supriyati, & Nur Hidayat. (2008). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan PersepsinWajib Pajak terhadap Kepatuhan Waajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, vol.7, No.1, Mei 2008.

Tjiptono, Fandy. 2007. Manajemen Jasa, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Umi Narimawati, Sri Dewi A., & Lina I. (2011). *Penulisan Karya Ilmiah.* Bekasi: Genesis.

Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

Widayanti dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan